

Menelisik Aktivitas Pariwisata di Sulawesi Selatan Pada Masa Kolonial (1929-1942)

Syafaat Rahman Musyaqqat¹, Nurfadilah Fajri Rahman²

¹Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia, Jalan Margonda Raya Kota Depok 16424, Indonesia

²Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera Barat, Jalan Raya Belimbing No. 16 A Kota Padang 25173, Indonesia

Email: syafaatrahman04@gmail.com

Received 23 July 2020; Received in revised form 01 August 2020; Accepted 24 August 2020

Abstrak

Sejauh ini sejarah Sulawesi Selatan cenderung dipotret melalui kaca mata politik dan perniagaan. Padahal, dalam sejarah pariwisata di Hindia Belanda, Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah tujuan wisata saat itu. Artikel ini mendiskusikan aktivitas pariwisata di Sulawesi Selatan pada masa kolonial (1929-1942). Sumber-sumber yang digunakan antara lain majalah, koran dan catatan perjalanan para pelancong. Dengan menggunakan metode sejarah yang menekankan pada proses dan waktu, studi ini menemukan bahwa kemunculan aktivitas pariwisata di Sulawesi Selatan pada dasarnya merupakan bentuk perjumpaan antara tren global dan kebutuhan lokal masyarakat saat itu. Potensi wisata, seperti keindahan alam dan keunikan budaya masyarakat di daerah ini tentunya memiliki nilai tersendiri yang telah menambah opsi perjalanan para wisatawan di Hindia Belanda.

Kata Kunci: Pariwisata, Sulawesi Selatan, masa kolonial

Abstract

So far the history of South Sulawesi has tended to be portrayed through the eyes of politics and commerce. In fact, in the history of tourism in the Dutch East Indies, South Sulawesi became one of the tourist destinations at that time. This article discusses tourism activities in South Sulawesi during the colonial period (1929-1942). Sources used include magazines, newspapers and travelers travel notes. Using historical methods that emphasize process and time, this study found that the emergence of tourism activities in South Sulawesi was basically a form of encounter between global trends and the local needs of the people at that time. Potential tourism, such as natural beauty and cultural uniqueness of the people in this area certainly has its own value that has added to the travel plan options of tourists in the Dutch East Indies.

Keywords: Tourism, South Sulawesi, the colonial period

PENDAHULUAN

Pariwisata adalah hal yang seringkali menarik untuk diperbincangkan. Posisinya sebagai sektor termudah dalam menghasilkan devisa telah mendorong setiap negara berlomba-lomba menarik kunjungan wisatawan mancanegara. Tahun lalu, pemerintah Indonesia telah menegaskan bahwa pariwisata merupakan sektor unggulan yang telah melampaui kedudukan komoditas minyak

sawit. Hal itu merujuk pada tingkat pertumbuhan pariwisata di Indonesia yang setiap tahun menunjukkan grafik positif. Sebagai gambaran, misalnya, pada 2017 pertumbuhan pariwisata di Indonesia dikabarkan menempati posisi kedua (22 persen) tertinggi di Asia Tenggara setelah Vietnam yang berada di posisi pertama dengan pertumbuhan sebanyak 29 persen (Nasution, 16 Oktober 2019).

Perhatian terhadap sektor pariwisata di Indonesia sebenarnya bukanlah gejala baru. Beberapa karya historiografi memperlihatkan bahwa aktivitas dan pengelolaan pariwisata di Indonesia telah menjadi aspek perhatian sejak masa kolonial. Menariknya, fenomena itu bukan hanya tampak di daerah Jawa, tetapi juga di daerah luar Jawa, termasuk Sulawesi Selatan.

Ditimbang secara geografis, adanya aktivitas pariwisata di Sulawesi Selatan pada masa kolonial memang tidaklah berlebihan. Daerah ini terletak di jazirah barat daya Pulau Sulawesi. Selain dataran rendah di pesisir barat dan timur, Sulawesi Selatan juga memiliki dataran tinggi dengan dua pegunungan yang menawarkan hawa sejuk, yakni Pegunungan Lompobattang di bagian selatan dan Pegunungan Latimojong di bagian utara. Toraja, yang sampai hari ini dikenal luas oleh wisatawan mancanegara, juga berada di bagian utara jazirah Sulawesi Selatan.

Bagaimanapun, aktivitas turisme di Sulawesi Selatan pada masa kolonial merupakan fenomena historis yang unik. Di satu sisi, faktor keamanan adalah aspek yang penting dalam kegiatan pariwisata. Di lain sisi, Sulawesi Selatan acapkali disinggung sebagai daerah yang cukup aktif mengadakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial. Paling tidak sejak abad ke-18 gerakan demi gerakan terus mewarnai jalannya

pemerintahan Belanda di wilayah ini. Itulah sebabnya daerah ini juga dikenal sebagai 'pulau keonaran' atau *onrust eiland* (Paeni, Poelinggomang, & Mirawati, 2002; Poelinggomang, 2004).

Seiring bergulirnya waktu, sematan tersebut rupanya tidak serta merta menghindarkan wilayah ini dari kegiatan pariwisata di era kolonial. Hal itu terlihat ketika *Vereeniging Touristenverkeer* (VTV), sebuah perhimpunan yang dibentuk untuk mempromosikan pariwisata di Hindia Belanda pada 1908, turut mempromosikan destinasi wisata di daerah luar Jawa seperti Sumatera, Bali, Kalimantan dan Sulawesi. Masing-masing wilayah itu sudah tentu memiliki proses historis yang berbeda terkait keterlibatannya dalam aktivitas pariwisata sebagai kegiatan yang diatur, termasuk Sulawesi Selatan.

Setalian dengan itu, artikel ini mendiskusikan aktivitas pariwisata di Sulawesi Selatan pada periode kolonial (1929-1942). Selain mengulik sejarah pariwisata, topik artikel ini diharapkan dapat menampilkan perspektif lain dalam menyorot Sulawesi Selatan di masa lalu. Adapun pertanyaan yang diajukan dalam tulisan ini ialah bagaimana latar belakang keterlibatan daerah Sulawesi Selatan dalam pariwisata di masa kolonial? dan apa saja obyek wisata yang dipromosikansaat itu?.

Karya Robert Cribb (1995) merupakan studi awal yang kajiannya secara khusus menyorot aktivitas pariwisata internasional di Jawa pada 1900-1930. Ia menegaskan bahwa pariwisata modern (*modern tourism*) di Hindia Belanda baru mulai berlangsung pada permulaan abad ke-20, dengan adanya buku panduan wisata saat itu (1995: 193). Sementara itu, studi Hans Meulendijks (2017) melihat bahwa pembentukan VTV pada prinsipnya bertujuan untuk meneguhkan imperialisme Belanda dengan memperlihatkan citra positif Hindia Belanda kepada dunia. Disertasi Achmad Sunjayadi (2017) cukup penting bagi artikel ini. Kajiannya mengetengahkan dinamika pariwisata yang berlangsung di Hindia Belanda (1892-1942). Ia juga menyebut Sulawesi Selatan sebagai salah satu daerah wisata yang dipromosikan oleh VTV. Kendati demikian, Sunjayadi tidak menyinggung lebih jauh bagaimana dinamika awal keterlibatan daerah ini dalam pariwisata.

Dalam konteks Sulawesi Selatan, belum terdapat studi yang mengulas pariwisata di Sulawesi Selatan dari perspektif historis. Buku yang berjudul *Sejarah Sulawesi Selatan Jilid 2* (2005) juga tidak menyinggung terkait fenomena pariwisata di masa kolonial. Beruntung ada kajian Kathleen Adams (1998) yang mengulas pariwisata di Toraja pada masa Orde Baru. Sayangnya,

Kathleen menuturkan bahwa pariwisata adalah fenomena baru bagi daerah Toraja, yang mulai berlangsung sejak 1971 (1998: 80). Padahal, berdasarkan sumber-sumber yang penulis peroleh, aktivitas pariwisata di Toraja khususnya dan Sulawesi Selatan umumnya adalah fenomena yang telah berlangsung sejak masa kolonial.

Pendapat Kathleen di atas jelas mencerminkan perlunya pendekatan sejarah dalam studi pariwisata. Christian dan Jayne (2019:112) menandakan bahwa pendekatan sejarah dalam pariwisata penting untuk mengungkap penandaan, pemasaran dan eksploitasi jejak, cerita, warisan budaya, otentitas, dan perbedaan dari setiap destinasi wisata. penekanan Bertolak dari pemikiran tersebut, disini penulis berasumsi bahwa pariwisata yang tampak dewasa ini di Sulawesi Selatan pada dasarnya merupakan akumulasi pengalaman masa lalu yang polanya sudah terbentuk paling tidak sejak masa pemerintah kolonial Belanda.

Konsep pariwisata dalam artikel ini diartikan sebagai kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari suatu tempat (tempat asal) ke tempat lain (tempat tujuan) dalam kurun waktu tertentu dengan maksud bersenang-senang, usaha atau tujuan lain. Istilah pariwisata sering juga dipadankan dengan kata 'turisme'. Sehingga, dalam artikel ini, orang yang

melakukan kegiatan wisata disebut sebagai 'wisatawan' atau 'turis'. Dalam konteks Hindia Belanda, mereka yang termasuk para naturalis, pendeta, pejabat pemerintah, perwira militer dan avonturir disebut sebagai *traveler*. Sebutan ini digunakan untuk membedakan dengan kegiatan wisatawan yang cenderung sekedar untuk bersenang-senang. Selain itu, kegiatan pariwisata atau turisme disini sifatnya sebagai 'kegiatan yang diatur'. Sebab aspek-aspek seperti akomodasi, transportasi dan obyek wisata telah diketahui sebelumnya oleh wisatawan, baik melalui promosi maupun buku panduan wisata. Dengan demikian, kegiatan tersebut dikategorikan pula sebagai *modern tourism* (Cribb, 1995; Sunjayadi, 2017: 34).

METODE

Metode yang digunakan ialah metode sejarah yang terdiri dari beberapa tahap antara lain heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Metode sejarah digunakan untuk menguji dan menganalisa secara kritis terkait rekaman dan peninggalan masa lalu serta menjadi panduan bagi sejarawan dalam merekonstruksi masa lampau berdasarkan data yang diperoleh (Gottschalk, 1985).

Pada tahap heuristik, penulis mencari dan mengumpulkan sumber-sumber, baik yang sifatnya primer maupun sekunder. Sumber primer yang

digunakan ialah majalah *Tourism in Netherland India*. Majalah ini merupakan majalah edisi khusus VTV pada 1933 yang diperoleh di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Jakarta. Sumber itu akan dikolaborasikan dengan koran dan sumber terbitan sezaman yang diperoleh di Perpustakaan Nasional RI dan website *delpher.nl*. Sumber lain ialah catatan perjalanan dari naturalis dan pelancong. Adapun sumber sekunder yang digunakan ialah berupa hasil kajian yang berkaitan dengan topik penelitian.

Berbagai sumber yang telah dikumpulkan kemudian diverifikasi (kritik sumber), baik internal maupun eksternal, untuk menguji keotentikan dan kredibilitas sumber. Tahap selanjutnya ialah interpretasi. Tahap ini merupakan penentuan hubungan kausalitas antara berbagai data sejarah untuk menetapkan fakta sejarah. Tahap terakhir ialah historiografi. Pada tahap inilah berbagai fakta sejarah yang telah ditetapkan kemudian dirangkai ke dalam suatu tulisan yang sistematis dan utuh mengenai aktivitas pariwisata di Sulawesi Selatan pada periode kolonial (1929-1942).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pariwisata di Hindia Belanda sampai Dekade Kedua Abad ke-20

Makassar was the first Dutch town I had visited and I found it prettier and cleaner than any I had yet seen in the East. Begitulah kesan Alfred Russel Wallace, seorang naturalis Inggris

ternama di abad ke-19, dalam kunjungan pertama kalinya ke Makassar pada September 1856. Di pusat pemerintahan wilayah *Celebes en Onderhoorigheden* ini, Wallace menyaksikan pemandangan berupa pantai yang landai dan datar ditambah jejeran pepohonan, hamparan sawah dan desa-desa di pedalaman yang membuat kesan menyenangkan di mata orang Eropa seperti dirinya. Setahun berikutnya, Wallace kembali mengunjungi Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Maros, yang terletak sekitar 30 km sebelah utara Makassar. Di sana, ia mengamati “air terjun (yang) menghadirkan pemandangan yang indah, kilauan sekumpulan kupu-kupu oranye, kuning, putih, biru dan hijau, yang ketika diganggu beterbangan ratusan kupu-kupu di udara membentuk awan yang berwarna-warni” (Wallace, 2016).

Meskipun terkesan menyenangkan, pengalaman berkunjung ke Hindia Belanda, seperti halnya Wallace, memang tidak begitu mudah dirasakan oleh orang asing saat itu. Di abad ke-19, pemerintah kolonial menerapkan pembatasan bagi kunjungan orang asing. Hal ini tampak dari kebijakan pemerintah yang mewajibkan setiap pengunjung asing memiliki surat izin (*toelatingskart*). Aturan ini berlaku hingga awal abad ke-20 (Sunjayadi, 2017: 274). Di Sulawesi Selatan, di samping kewajiban memiliki *toelatingskart*, orang asing juga perlu melapor kepada

penguasa kerajaan pribumi setempat. Kondisi ini turut dikemukakan oleh Wallace ketika berkunjung ke suatu daerah pedalaman yang merupakan bagian dari wilayah Kerajaan Gowa (Wallace, 2009). Demikian pula halnya pengalaman Paul dan Frits Sarasin, dua naturalis bersaudara asal Swiss, yang berkunjung ke Enrekang pada Juli 1897. Ketika tiba di pelabuhan Parepare, ia perlu memperoleh izin dari Raja Sidenreng terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanannya (Bataviaasch Nieuwsblad 29 September 1897).

Pada abad ke-19, kunjungan para *traveler* ke Hindia Belanda sangat berkaitan dengan kegiatan perjalanan (*traveling*) yang saat itu sedang menggejala di Eropa. Hal itu berawal dari revolusi industri yang telah berlangsung di Eropa sejak abad ke-18. Sepanjang abad ke-19, dampak revolusi industri tidak saja meningkatkan penghasilan masyarakat, melainkan juga semakin memperjelas antara waktu bekerja dan waktu luang. Pada gilirannya kondisi ini menjadikan kegiatan *traveling* sebagai salah satu kegiatan yang tren saat itu (Cribb, 1995).

Perkembangan teknologi transportasi di abad ke-19, seperti pengenalan kereta api dan kapal uap, membuat biaya transportasi juga semakin murah. Akibatnya, kegiatan *traveling* mulai dapat diakses oleh semua orang, yang sebelumnya hanya dilakukan

oleh keluarga kaya dan bangsawan di Eropa dalam bentuk *Grand Tour*. Dalam perkembangannya, daya jangkau teknologi baru tersebut praktis mendukung adanya pengeksploasian destinasi baru di luar wilayah Eropa dan Amerika Utara. Pencarian itu terutama ke dunia timur atau yang dianggap sebagai 'dunia terbelakang' di mata orang Barat. Edward Said (2012) menyatakan bahwa dunia timur di mata orang barat merupakan tempat bagi makhluk eksotik, penuh romansa, kenangan manis dan pengalaman mengesankan. Dunia timur yang dimaksud disini tentu saja mencakup daerah Hindia Belanda. Penjelahan ke dunia timur pun semakin didukung dengan pembukaan Terusan Suez (1869) yang mempersingkat waktu perjalanan dari Eropa ke Asia.

Faktor lain yang menarik kunjungan para *traveler* ke Hindia Belanda ialah pelaksanaan Pameran Kolonial Internasional pada 1883 di Amsterdam, Belanda. Pameran ini awalnya ditujukan untuk memperkenalkan produk industri dan tanah jajahan Belanda kepada publik di Eropa. Namun, dengan menampilkan berbagai produk budaya di Hindia Belanda, pameran itu justru menjadi daya tarik tersendiri bagi orang asing untuk datang melihat langsung Hindia Belanda. Dalam ajang pameran tersebut, kesan dunia timur sebagai 'dunia primitif

dan eksotis' merupakan citra yang semakin melekat di mata orang barat (Ariwibowo, 2015).

Dengan kondisi demikian, tidak heran jika lalu lintas orang asing yang berwisata ke Hindia Belanda mengalami peningkatan di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Akan tetapi, kegiatan turisme di Hindia Belanda belum dikelola secara baik saat itu. Dalam disertasinya, Sunjayadi (2017: 216) mengungkapkan satu contoh kondisi pariwisata di Jawa Tengah, yang saat itu masih minim informasi dan belum adanya buku panduan, petunjuk jalan dan pemandu objek di Borobudur, Prambanan dan Dataran Tinggi Dieng.

Keadaan tersebut mendorong beberapa kalangan masyarakat untuk mengusulkan kepada pemerintah kolonial mengenai perlunya pembentukan suatu perhimpunan yang mengelola pariwisata di Hindia Belanda. Dorongan ini juga berkaca dari keberhasilan Jepang dalam mengelola pariwisatanya dengan membentuk *Kihinkai* (didirikan pada 1893). Perlu diketahui, *Kihinkai* tengah mendapat perhatian dunia internasional ketika itu (Sunjayadi, 2017). Terlepas dari hal tersebut, Cribb (1995: 195) justru melihat bahwa setidaknya ada dua faktor yang mengubah pandangan pemerintah kolonial terkait kunjungan wisatawan saat itu. *Pertama*, kebijakan politik etis yang diterapkan pemerintah kolonial

sejak 1901 tidak hanya menuntut upaya perbaikan kesejahteraan hidup masyarakat, tetapi juga mengurangi alasan pemerintah untuk menyembunyikan kondisi Hindia dari kunjungan wisatawan asing. *Kedua*, pariwisata adalah sektor yang dianggap dapat memberikan sumber pendapatan baru dalam rangka membiayai program yang direncanakan dalam politik etis.

Dengan berbagai faktor tersebut, maka pada 13 April 1908 dibentuklah suatu perhimpunan yang dikenal dengan *Vereeniging Toeristenverkeer* (VTV) di Batavia. Perhimpunan ini terdiri dari unsur pemerintah dan unsur swasta, seperti bidang perhotelan, transportasi dan perbankan. Selain bertujuan mempromosikan wisata di Hindia Belanda, VTV juga mengadakan kerjasama, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sejak saat itu, menarik minat orang asing berwisata ke Hindia Belanda menjadi tugas VTV (Sunjayadi, 2017, 2018). Oleh karena itu, bisa diutarakan bahwa, selain sebagai dampak dari tren global pariwisata saat itu, pembentukan VTV pada prinsipnya merupakan tonggak penting dalam organisasi pariwisata di masa Hindia Belanda.

Di awal berdirinya, VTV tidak hanya berfokus mempromosikan destinasi wisata di Jawa, namun juga di wilayah lain di Hindia Belanda, seperti misalnya, dataran tinggi Padang,

Sumatera. Pada 1914, Bali juga mulai dipromosikan oleh VTV, seperti terlihat dalam buku panduan yang berjudul *Illustrated Tourist Guide to East Java, Bali and Lombok* (1914). Sementara itu, pada dekade 1920-an, promosi wisata di Sumatera pun mulai menjamah daerah lain seperti Medan dan Deli.

Selain promosi wisata, VTV turut mendirikan cabang, perwakilan dan panitia lokal sebagai perwakilan mereka di berbagai daerah. Sampai dekade 1910-an, cabang VTV tersebar di beberapa daerah seperti Surabaya, Semarang dan Padang. Sementara itu, VTV juga membentuk perwakilan di Surakarta, Yogyakarta dan Kedu. Di daerah Priangan, yang terkenal dengan wisata gunung Papandayannya, perhimpunan tersebut juga mendirikan sebuah panitia lokal. Bahkan, seiring perkembangannya, VTV semakin melebarkan sayapnya dengan membuka kantor cabang di Medan pada 1925 dan Bali pada 1927 (Sunjayadi, 2017). Ringkasnya, melalui VTV, perkembangan tren global pariwisata sebagai kegiatan yang diatur telah membuka lebar beberapa wilayah di Hindia Belanda terhadap kunjungan wisatawan asing.

Keterlibatan Awal Daerah Sulawesi Selatan dalam Pariwisata di Masa Kolonial: Antara Tren Global dan Kebutuhan Lokal

Sebelum menelusuri lebih jauh, penulis terlebih dahulu menjelaskan posisi Sulawesi Selatan dalam konteks

kolonial. Sulawesi Selatan terletak di jazirah barat daya Pulau Sulawesi, yang diapit oleh perairan Selat Makassar di sebelah barat dan Teluk Bone di sebelah timur. Dalam sejarahnya, daerah ini baru berhasil dikuasai secara penuh oleh pemerintah kolonial Belanda pasca pasifikasi politik yang diikuti dengan ekspedisi militer pada 1905. Kendati demikian, pengaruh hegemoni Belanda yang merasuk hingga ke wilayah pedalaman Sulawesi Selatan baru terasa di 1910 (Harvey, 1990: 213).

Pada 1906 Sulawesi Selatan juga ditata oleh pemerintah kolonial ke dalam satu wilayah pemerintahan atau yang lazimnya dikenal sebagai *Gouvernement Celebes en Onderhoorigheden*. Wilayah pemerintahan ini terbagi menjadi tujuh bagian (*afdeeling*) pemerintahan yang masing-masing dipimpin oleh seorang asisten residen. *Afdeeling* tersebut antara lain Makassar, Bantaeng, Bone, Parepare, Luwu, Mandar dan Buton dan Pesisir Timur Sulawesi. Sementara itu, selain sebagai ibukota wilayah pemerintahan Selebes dan Taklukannya, Makassar adalah satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang ditetapkan sebagai *gemeente* (kota praja) sejak 1906 (Harvey, 1989; Poelinggomang et al., 2005).

Dalam konteks pariwisata, sampai 1928 VTV, selaku perhimpunan resmi yang diakui oleh pemerintah kolonial, sama sekali belum melirik Sulawesi

Selatan sebagai tujuan wisata. Padahal, dekade 1920-an bisa dikatakan sebagai dekade dimana beberapa wilayah di Hindia Belanda telah bersentuhan langsung dengan kegiatan pariwisata internasional saat itu. Jawa, Bali dan Sumatera telah menjadi bagian penting dalam *itinerario* turis di Hindia Belanda saat itu. Bahkan aturan mengenai *toelatingskaart* bagi orang asing juga telah diperlunak untuk daerah Jawa dan Madura sejak 1912 dan wilayah lain di Hindia Belanda pada 1918. Sehingga, bagi turis, mereka tidak perlu lagi memiliki *toelatingskaart* jika hendak mengunjungi wilayah Hindia Belanda. Sebagai penggantinya, mereka diperbolehkan hanya dengan menunjukkan *rondreisbiljet*, *retourbiljet* atau *touristenbiljet* (Sunjayadi, 2017).

Akan tetapi, minat turis terhadap destinasi wisata Hindia Belanda mulai mengalami perubahan di sepanjang dekade 1920-an. Obyek wisata alam, misalnya, dengan menikmati daerah pegunungan tidak lagi menjadi fokus utama para turis. Perhatian wisata justru bergeser ke daya tarik budaya. Itulah mengapa Cribb menyebutkan bahwa pusat pariwisata Hindia Belanda telah beralih dari Jawa ke Bali selama dekade 1920-an (1995: 204). Terlebih lagi, selama dekade tersebut perbaikan fasilitas pendukung pariwisata di Bali mulai diintensifkan sehingga reputasi

Bali sebagai 'surga eksotis' semakin menarik minat wisatawan (Meulendijks, 2017). Di lain sisi, tidak sedikit pula turis yang mengeluh ketika berwisata ke Pulau Jawa, yang dianggapnya sudah modern, ramai dan tidak lagi natural (Sunjayadi, 2017). Perubahan tersebut pada gilirannya bukan saja mengangkat posisi Bali sebagai sentra wisata di Hindia Belanda, namun juga memunculkan 'destinasi baru' dalam aktivitas turisme, termasuk Sulawesi Selatan.

Selain perubahan minat tersebut, awal keterlibatan Sulawesi Selatan dalam turisme tidak terlepas dari kontribusi *Koninklijk Java Motor Club* (KJMC). KJMC adalah organisasi para pemilik kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, di Hindia Belanda. Organisasi ini cukup rutin menerbitkan buku panduan berisi informasi yang tidak hanya bermanfaat bagi para anggotanya, tetapi juga para wisatawan. Peran organisasi tersebut terlihat dalam buku panduan yang diterbitkan pada 1928. Dalam buku itu, KJMC mulai memasukkan informasi pariwisata mengenai hotel dan pesanggrahan yang ada di Sulawesi, Kalimantan, Riau, Lombok, Timor dan Maluku (De Locomotief 29 Februari 1928).

Penerbitan tersebut rupanya cukup menentukan keterlibatan daerah Sulawesi Selatan dalam kegiatan pariwisata di Hindia Belanda. Hal itu

terbukti setahun berikutnya dengan berlabuhnya kapal wisata Franconia di pelabuhan Makassar pada 27 Maret 1929. Kapal yang mengangkut sekitar 400 wisatawan asal Amerika ini disebut sebagai kapal wisata pertama yang berkunjung ke Sulawesi Selatan (Soerabaijasch Handelsblad 3 April 1929). Ketika tiba di Makassar, aktivitas wisata diatur oleh para agen kapal yang kemudian menyewa lebih dari seratus mobil untuk digunakan para turis saat itu. Dari jumlah tersebut, sebagian berkunjung ke Maros menikmati air terjun Bantimurung dan sebagiannya lagi berkeliling dalam Kota Makassar dan sekitarnya. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa sandarnya kapal Franconia menandai awal kegiatan turisme di Sulawesi Selatan.

Berkaca dari keberhasilan kunjungan kapal wisata tersebut, akhirnya di penghujung 1929 VTV mulai menjalin kerjasama dengan Gubernur Selebes dan Daerah Taklukannya, L.J.J. Caron (memerintah 1929-1933), untuk mempromosikan wisata di Sulawesi Selatan (Soerabaijasch Handelsblad 10 Desember 1929). Sejak saat itu, Sulawesi Selatan secara resmi menjadi daerah tujuan wisata di Hindia Belanda. Hal ini terlihat pula dengan terbitnya majalah *Tourism in Netherlands India* yang dikeluarkan oleh VTV pada 1930. Majalah itu mencakup sebuah nomor khusus yang memperkenalkan destinasi wisata di

Sulawesi, di samping Kalimantan, Sunda Kecil dan Maluku (*Algemeen Handelsblad* 13 Mei 1930). Jalinan kerjasama antara VTV dan Gubernur Selebes juga ditandai dengan kunjungan Van Barda, Direktur VTV, ke beberapa daerah di Sulawesi Selatan seperti Makassar, Watampone, Sengkang, Kalosi, Toraja dan Parepare pada 8 Desember 1932. Dalam lawatan itu, Van Barda bermaksud meninjau potensi dan kesiapan fasilitas penunjang pariwisata di Sulawesi Selatan (*Soerabaijasch Handelsblad* 21 Desember 1932).

Terlepas dari peran KJMC, faktor lain yang memungkinkan keterlibatan daerah Sulawesi Selatan dalam turisme ialah aktivitas pelesir, terutama masyarakat Eropa yang bermukim di Kota Makassar. Dalam tulisannya yang berjudul *Aktivitas Pelesir Orang-Orang Eropa di Surabaya Masa Kolonial (Abad-20)*, Wiretno (2019) menuturkan bahwa pelesir adalah kegiatan perjalanan untuk menghilangkan rasa penat setelah beraktivitas rutin, baik di tempat kerja maupun sekolah. Aktivitas ini pada dasarnya berkaitan dengan gaya hidup masyarakat Eropa yang dibawa dari negaranya, dimana waktu luang dan melepaskan diri dari kepenatan dilakukan dengan kegiatan wisata atau liburan di setiap akhir pekan.

Aspek kebutuhan lokal disini akan tampak jelas bila memperhatikan jumlah penduduk Eropa dan keberadaan

destinasi pelesiran. Sebagai gambaran, pada 1930 jumlah penduduk Kota Makassar ialah 84.855 jiwa. Dari jumlah itu, 3.561 jiwa diantaranya ialah orang Eropa atau sekitar 76 persen dari total orang Eropa yang bermukim di wilayah Selebes dan Daerah Taklukannya (Harvey, 1989). Keadaan itu jelas menggambarkan bahwa hampir sebagian besar masyarakat Eropa bermukim di kota niaga tersebut.

Satu hal yang menarik adalah bahwa pemusatan itu justru tidak sebanding dengan keberadaan destinasi pelesiran terbuka bagi masyarakat Kota Makassar, terutama untuk menikmati pemandangan dan hawa sejuk pegunungan. Sampai 1929, ada beberapa lokasi yang menjadi destinasi wisata lokal di sekitar daerah pegunungan, yaitu Parigi, Cikoro, Lombassang dan Borongrappoa. Semua destinasi itu berada di kawasan kaki Gunung Lompobattang dan masing-masing lokasi itu juga terdapat semacam pondok pribadi (*particulieren pondokjes*). Sayangnya, jumlah pondok sebagai tempat penginapan tidak sebanding dengan banyaknya minat pelesiran warga saat itu (*De Locomotief* 30 Juni 1932; *Soerabaijasch Handelsblad* 3 April 1929).

Dengan kondisi demikian, tidak jarang warga Kota Makassar dan sekitarnya, baik masyarakat Eropa, Cina maupun pribumi yang cukup bermodal, lebih memilih untuk pelesiran ke Pulau

Jawa. Umumnya mereka berkunjung ke Bandung dan Malang untuk sekedar merasakan 'hidung dingin' (baca: hawa sejuk pegunungan). Selain minimnya destinasi pelesiran, ada juga yang berlibur ke Jawa karena pengaruh cerita dan pengalaman dari kerabat atau keluarga yang sebelumnya telah berlibur di sana (Pemberita Makassar 27 Mei 1931; Soerabaijasch Handelsblad 24 Juli 1931).

Kondisi itulah yang kemudian mendorong pemerintah kolonial setempat untuk mengembangkan destinasi pelesiran baru di sekitar Makassar. Diantaranya ialah Resor Pegunungan di Malino (mulai dibangun 1929) dan Permandian Pantai Barombong (dibuka pada 1929). Pembukaan wisata tersebut secara tidak langsung justru menambah pilihan destinasi wisata dalam kegiatan turisme di Sulawesi Selatan saat itu. Hal ini terlihat jelas dalam majalah *Tourism in Netherland India* yang diterbitkan oleh VTV pada 1933, dimana Malino dan Barombong juga turut dipromosikan. Jadi, sampai disini jelas bahwa awal mula keterlibatan Sulawesi Selatan dalam kegiatan turisme pada dasarnya merupakan titik temu antara tren global dan kebutuhan lokal masyarakat saat itu.

Patut ditekankan disini bahwa meski kerjasama telah terjalin antara VTV dan Gubernur Selebes pada 1929, namun VTV tidak mendirikan kantor cabang atau perwakilan mereka di

Sulawesi Selatan. Hal ini sangat berbeda dengan daerah lainnya seperti Jawa, Sumatera dan Bali. Hingga masuknya pendudukan Jepang, sejauh penelusuran penulis, perhimpunan lokal yang khusus mengelola turisme di Sulawesi Selatan juga tidak ditemukan. Oleh sebab itu, aktivitas pariwisata sebagai kegiatan yang diatur di daerah ini cukup bergantung pada peran perusahaan pelayaran, seperti KPM dan JCJL serta agen wisata, di samping promosi VTV. Meski ada juga turis, terutama yang berangkat secara individual, yang memanfaatkan informasi dari kerabat yang telah bermukim di daerah ini.

Semenjak sandarnya kapal wisata Franconia di pelabuhan Makassar, para pelancong, baik secara individual maupun kelompok, silih berganti mengunjungi daerah ini. Tidak dipungkiri bahwa data terkait jumlah kunjungan turis di Sulawesi Selatan cukup sulit untuk ditemukan. Namun informasi mengenai kedatangan kapal wisata setidaknya bisa merepresentasikan keadaan turisme selama periode itu.

Pada 1929, misalnya, tercatat dua kunjungan kapal wisata, yaitu Kapal Franconia dan Kapal Stella Polaris. Yang terakhir ialah perjalanan wisata yang diatur oleh Thomas Cook & Son. Kapal yang membawa sekitar 180 wisatawan Eropa ini tiba di Makassar pada 14 Desember 1929. Dua tahun kemudian, dua kapal wisata juga dikabarkan

menyinggahi pelabuhan Makassar, yakni Kapal Resolute dengan sekitar 90 wisatawan dan Kapal Columbus juga dengan 90 turis asing. Rombongan turis ini mengunjungi air terjun Bantimurung yang sangat populer ketika itu. Berikutnya, pelabuhan Makassar menjadi persinggahan pertama di Hindia Belanda dalam tur wisata Kapal Mariposa. Tur wisata yang diatur oleh KPM ini tiba di pelabuhan Makassar pada 7 Maret 1932. Sementara itu, dengan menumpang Kapal Melchior Treub milik KPM, konsul Cina beserta stafnya mengunjungi Makassar pada 25 Maret 1933 dan juga mengadakan perjalanan wisata ke Resor pegunungan Malino. Di tahun yang sama, Kapal Ulysses dengan membawa 146 wisatawan, yang sebagian besar asal Inggris, juga diwartakan akan mengunjungi Makassar dalam tur wisatanya di Hindia Belanda (Bataviaasch Nieuwsblad 13 Oktober 1933; Soerabaijasch Handelsblad 15 Maret 1932; 20 Maret 1931; 21 Desember 1929; 25 Maret 1931; 27 Maret 1933).

Menjelang masuknya tentara pendudukan Jepang, jejak aktivitas pariwisata di Sulawesi Selatan masih dapat ditelusuri. Seperti misalnya, kedatangan para turis di Makassar dengan menggunakan Kapal Merak milik KPM pada 1939 (Het Vaderland 3 Februari 1939). Selain itu, kunjungan wisata pun tidak hanya berasal dari turis Eropa dan Amerika, namun juga turis Asia. Kapal

Hozan Maru, misalnya, yang mengangkut sekitar 80 wisatawan asal Jepang diwartakan menyinggahi pelabuhan Makassar pada 1936 (Soerabaijasch Handelsblad 28 Oktober 1936).

Pertanyaannya, mengapa kemunculan aktivitas pariwisata sebagai kegiatan yang diatur di Sulawesi Selatan terkesan lebih lambat dibanding daerah lain di Hindia Belanda?. Realitas itu sudah barang tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, di samping perubahan orientasi wisata dan semakin modernnya daerah Jawa. *Pertama*, hal ini menyangkut masalah keamanan. Keadaan yang tidak kondusif terus berlangsung di Sulawesi Selatan sebagai bentuk resistensi masyarakat setempat terhadap politik pasifikasi yang dilancarkan oleh pemerintah kolonial sejak 1905. Hal ini sudah tentu mempengaruhi kondisi keamanan para wisatawan saat itu. Kendati demikian, semenjak 1916 tendensi perlawanan mengalami perubahan dan umumnya yang muncul berupa gerakan pengharapan, ramalan-ramalan dan nasionalisme (Poelinggomang, 2004; Poelinggomang et al., 2005). Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa seiring meningkatnya arus wisata di Hindia Belanda pada dekade 1920-an, kondisi Sulawesi Selatan juga dirasa mulai dapat menjamin keamanan bagi para turis saat itu.

Faktor *kedua* ialah berkaitan dengan ketersediaan fasilitas penunjang pariwisata. Seperti misalnya, daerah Jawa yang telah memiliki jaringan jalan yang memadai dan kereta api sejak abad ke-19. Di Sulawesi Selatan, jaringan kereta api yang menghubungkan Makassar dan Takalar (46 km) memang telah beroperasi sejak 1923. Namun demikian, fasilitas tersebut tidak bertahan lama dan berhenti beroperasi pada 1 Agustus 1930 (Pemberita Makassar 28 Agustus 1930). Lagipula, jalur tersebut membentang di sepanjang garis pantai ke arah selatan sehingga tidak menjangkau destinasi wisata yang ada, seperti misalnya, Bantimurung.

Tidak kalah pentingnya ialah persoalan aksesibilitas, dalam hal ini jaringan jalan raya. Pengembangan pelabuhan Makassar yang dimulai sejak 1911 hingga 1914 pada dasarnya telah memungkinkan berlabuhnya kapal-kapal wisata yang umumnya berukuran besar. Hal itu tampak dengan terbangunnya sebuah tanggul besar untuk menampung kapal berukuran besar pasca renovasi tersebut (Asba, 2003). Sayangnya, kemajuan itu tidak didukung dengan pembangunan jaringan jalan raya yang memadai di Sulawesi Selatan. Bisa dikatakan bahwa baru di paruh kedua dekade 1920-an, daerah-daerah utama di Sulawesi Selatan mulai terhubung baik melalui jaringan jalan yang dapat diakses dengan mobil, baik di pesisir timur dan

barat Sulawesi Selatan serta sebelah selatan Kota Makassar menuju Bantaeng. Meskipun jalan dari Parepare menuju Majene dan jalan di Camba masih dalam proses pengerjaan di 1929. Dengan kondisi itu, tidak heran jika di akhir dekade 1920-an KJMC juga mulai menerbitkan peta mobil dan memasang beberapa papan penunjuk jalan di Sulawesi Selatan (Soerabaijasch Handelsblad 19 Agustus 1929; 3 April 1929).

Masuknya tentara pendudukan Jepang di Makassar pada 9 Februari 1942 akhirnya tidak lagi mendukung berlangsungnya aktivitas pariwisata di Sulawesi Selatan. Fasilitas pendukung pariwisata saat itu tidak luput dari kerusakan akibat serangan udara tentara Jepang. Salah satunya ialah dermaga pelabuhan. Bahkan destinasi wisata pun beralih fungsi. Seperti misalnya, resor pegunungan Malino yang dijadikan sebagai tempat pengungsian para wanita dan anak-anak Belanda. Sementara Toraja difokuskan sebagai tempat penyelamatan diri bagi para amtenar Belanda saat itu (Koerts, 2001). Sunjayadi (2017) juga menegaskan bahwa kedatangan tentara pendudukan Jepang mengakibatkan aktivitas pariwisata di Hindia Belanda terhenti sementara, meskipun tidak berhenti sama sekali.

Satu hal yang menarik adalah bahwa aktivitas turisme di Sulawesi

Selatan pada periode kolonial telah memunculkan peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal. Hal ini diketahui ketika para pedagang Makassar dan Tionghoa menjajakan souvenir kepada rombongan turis dari Kapal *Resolute* yang sedang berada di Oranje Hotel. Adapun souvenir yang dijual ialah anyaman Bugis, ukiran kayu Toraja, kain batik, sarung Mandar, tenun Palembang, tenun Kendari, kerajinan tembaga Jawa dan bahkan Burung Cendrawasih (Soerabaijasch *Handelsblad* 20 Maret 1931). Sejauh mana dampak aktivitas tursime terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat tentunya membutuhkan studi lebih lanjut.

Obyek Wisata: Berwisata Seminggu di Sulawesi Selatan

“Spend a week with South Celebes”, demikian komentar yang termuat dalam *Soerabaijasch Handelsblad* pada 3 April 1929. Komentar itu adalah ungkapan keheranan terkait kondisi Sulawesi Selatan yang sampai saat itu belum memiliki suatu perhimpunan lokal dalam mengelola aktivitas turisme. Yang tidak kalah menariknya ialah pernyataan itu juga menyiratkan potensi wisata Sulawesi Selatan yang tersebar di berbagai lokasi. Terkait obyek wisata, hal ini dapat ditelusuri dalam majalah *Tourism in Netherland India* (1933) yang diterbitkan oleh VTV. Sama halnya dengan daerah lain di Hindia Belanda, pada dasarnya

destinasi wisata Sulawesi Selatan mencakup dua kategori, yaitu alam dan budaya.

Adapun destinasi alam yang dipromosikan ialah Permandian Pantai Barombong yang dikelola oleh Tuan Beyer dan Permandian Laut di Pulau Morau (sekarang Pulau Khayangan), yang cukup populer sebagai destinasi wisata lokal saat itu. Di Maros, ada Air Terjun Bantimurung dan telah dilengkapi dengan sebuah kolam renang. Dekat Bantimurung, terdapat pula sebuah gua stalaktit yang bisa dikunjungi para turis. Sementara itu, untuk menikmati hawa sejuk pegunungan, majalah itu pun menyarankan agar para turis hendaknya mengunjungi resor pegunungan Malino, yang berjarak 70 kilometer dari Makassar. Menariknya, selain pesanggrahan dan hotel, di Malino juga tersedia kolam renang dan lapangan tenis untuk memanjakan para wisatawan. Lokasi sejuk lainnya ialah Loka, Cikoro dan Borongrappoa. Ketiga lokasi tersebut bisa dikunjungi dengan mobil atau taksi. Lama perjalanan sekitar 4-5 jam dari Makassar. Baik Malino, Loka, Cikoro maupun Borongrappoa, pada hakikatnya berada di kawasan pegunungan yang sama, yaitu Pegunungan Lompobattang.

Sementara itu, obyek wisata yang dipromosikan terkait budaya bisa ditemukan di dalam kota dan luar kota Makassar. Di Makassar, para turis dapat

mengunjungi beberapa bangunan tua seperti Fort Rotterdam, Fort Vredenburg, dan Kuil Cina di. Di luar Makassar, Toraja adalah destinasi wisata yang paling disarankan untuk dikunjungi para turis. Di sana, turis dapat menyaksikan keunikan budaya masyarakatnya, mulai dari upacara adat hingga arsitektur rumah. Selain itu, lokasinya juga berada di dataran tinggi sehingga menawarkan pemandangan dan hawa sejuk. Jadi, bisa dikatakan bahwa Toraja menjadi ‘destinasi istimewa’ dibanding lokasi wisata lainnya di Sulawesi Selatan.

Hal tersebut turut dikomentari oleh L.C. Admiral, direktur agen wisata Nitour, ketika berkunjung ke Toraja pada 1938. Menurutnya, keluhan para turis yang menganggap Hindia Belanda sudah terlalu berkembang saat itu dapat diminamisir dengan adanya Toraja. Lebih lanjut, menurutnya, Toraja memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata karena memiliki struktur geografis berupa pegunungan yang cukup berbeda dengan wilayah lain di Hindia Belanda, di samping penduduknya yang masih sangat ‘liar’ (De Sumatera Post 15 Juni 1938).

Dengan memperhatikan berbagai destinasi wisata tersebut, tidaklah berlebihan ketika menghabiskan waktu seminggu di Sulawesi Selatan adalah pilihan waktu yang tepat bila berwisata ke Sulawesi Selatan. Bukan suatu kebetulan jika istilah “perjalanan

seminggu di Sulawesi Selatan” kemudian digunakan oleh *Koninklijke Nederlandsche-Indische Luchtvaart Maatschappij* (KNILM) dalam brosurinya pada 1938 (De Indische Courant 12 Juli 1938). Bahkan, pada 1937 Robert Deppe, seorang pelancong yang kebetulan merupakan arsitektur pembangunan Pasar Gambir saat itu, bersama istrinya juga menghabiskan waktu seminggu ketika berwisata ke Sulawesi Selatan (Bataviaasch Nieuwsblad 21 Oktober 1937)

Kota Makassar adalah *starting point* bagi para turis bila hendak berwisata ke Sulawesi Selatan. Posisi ini agaknya tidak berlebihan mengingat statusnya sebagai kotapraja satu-satunya di daerah *Zuid-Celebes* sejak 1906. Apalagi, di dekade 1930-an Makassar bisa dikategorikan sebagai kota modern dan kosmopolitan (Makkelo, 2018). Sehingga berbagai fasilitas pendukung pariwisata, seperti misalnya, hotel, restoran, toko dan tempat hiburan serta beberapa perusahaan taksi yang dapat ditemukan dengan mudah di kota ini.

Seperti disebutkan dalam majalah *Tourism in Netherland India* (1933), Kota Makassar bisa dijangkau dengan menggunakan kapal milik KPM yang berangkat setiap dua kali dalam seminggu dari Jawa dan Bali. Di luar Hindia Belanda, kota ini masih dapat dikunjungi dengan pelayaran langsung dari negara-negara seperti Australia,

Amerika, Kanada, Shanghai, Hongkong, Manila dan Jepang. Seiring perkembangan teknologi dan transportasi, Makassar kemudian dapat pula dijangkau melalui perjalanan udara yang diusahakan oleh KNILM, sebuah perusahaan penerbangan di Hindia Belanda yang didirikan pada 1928. Dalam sebuah sumber disebutkan bahwa, KNILM secara resmi mulai membuka jalur penerbangan baru, yakni jalur Surabaya-Bali-Makassar pada 6 Mei 1935 (Soerabaijasch Handelsblad, 7 Mei 1935). Jalur ini beroperasi sekali dalam seminggu dengan menggunakan pesawat "Fokker F XII". Pada awalnya jalur tersebut hanya berlangsung selama 3 bulan sebagai masa percobaan dan tidak berlanjut setelah itu.

Meskipun demikian, dua tahun berikutnya atau tepatnya pada 27 September 1937 KNILM kembali membuka layanan penerbangan langsung dari Surabaya ke Makassar. Dalam *Soerabaijasch Handelsblad* pada 21 September 1937, secara gamblang dinyatakan bahwa pembukaan kembali jalur ini sangat mungkin dimanfaatkan oleh para pebisnis dan wisatawan. Dengan menggunakan pesawat, seorang pelancong menceritakan bahwa perjalanannya dari Surabaya ke Makassar yaitu selama tiga jam (Soerabaijasch Handelsblad, 24 Februari 1938).

Sebagai informasi tambahan, keberadaan hotel dan pesanggrahan

tentunya menjadi penting dalam aktivitas turisme. Di Sulawesi Selatan, hotel dapat ditemukan di dalam dan diluar kota Makassar. Sampai tahun 1940, setidaknya ada delapan pilihan hotel bagi para turis saat berada di Makassar. Diantaranya ialah Hotel Empress, Hotel Grand, Hotel Hok Bie Heng, Hotel Pension, Hotel Kiem Koek, Hotel Thay Tong, Hotel Speelman dan Hotel Wah Kiau (Telefoongids Makasser No. 51 Januari 1940). Di luar Makassar, hotel bisa ditemui di Malino (dibuka pada 1931) dan Parepare. Yang disebut terakhir baru berdiri pada akhir 1930-an. Sementara itu, berdasarkan peta persebaran hotel dan pesanggrahan dalam *Tourism in Netherland India* (1933), jumlah pesanggrahan di Sulawesi Selatan ialah sebanyak 20 unit. Pesanggrahan tersebut tersebar di setiap ibukota *afdeeling*, meski terdapat pula di beberapa *onderafdeeling*.

PENUTUP

Simpulan

Adanya aktivitas pariwisata di Sulawesi Selatan pada masa kolonial menunjukkan bahwa daerah ini pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan sematan '*onrust eiland*', tetapi juga daerah yang menjadi impian bagi para turis untuk melihat 'surga eksotis' di belahan dunia lain. Pariwisata merupakan tren global yang tidak dapat dihindari saat itu dan sekaligus melanda berbagai wilayah di Hindia Belanda.

Namun, dalam konteks Sulawesi Selatan, kemunculan kegiatan turisme juga tidak terlepas dari kebutuhan aktivitas pelesir masyarakat Kota Makassar. Dengan kata lain, keterlibatan daerah Sulawesi Selatan sebagai destinasi tujuan wisata di Hindia Belanda adalah titik perjumpaan antara tren global dan kebutuhan lokal saat itu.

Destinasi alam berupa pantai dan pegunungan merupakan ‘anugerah Tuhan’ yang mendukung adanya aktivitas turisme di Sulawesi Selatan sejak periode kolonial. Daerah ini tidak hanya menawarkan destinasi alam, namun juga destinasi budaya. Sebagai kota dagang yang telah berkembang sejak abad ke-16, Kota Makassar memiliki beberapa bangunan bersejarah yang menjadi ‘jualan’ kepada para turis saat itu, seperti misalnya, Fort Rotterdam dan Kuil Tua Cina. Yang tidak kalah pentingnya ialah Toraja. Selain berada di dataran tinggi dengan hawa sejuknya, Toraja juga menawarkan budaya masyarakat yang unik bagi orang Barat, mulai dari upacara adat hingga arsitektur rumah yang eksentrik. Berbagai destinasi tersebut menyiratkan bahwa pola obyek wisata yang digagas selama masa kolonial pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan upaya Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan terhadap sektor pariwisata dewasa ini.

Saran

Penekanan sejarah yang berfokus pada perubahan dalam kerangka waktu tentunya menjadi berguna dalam kajian pariwisata. Artikel sederhana ini setidaknya telah berupaya memotret sejarah Sulawesi Selatan dari perspektif lain, dalam hal ini pariwisata. Namun demikian, diskusi dan penelitian lebih lanjut tentu saja masih sangat terbuka luas. Sejauh mana peran masyarakat pribumi dan dampak aktivitas pariwisata di masa kolonial terhadap kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat adalah beberapa topik menarik yang bisa ditelusuri lebih jauh.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Terbit dan Surat Kabar

- Algemeen Handelsblad* 13 Mei 1930.
Bataviaasch Nieuwsblaad 29 September 1897; 13 Oktober 1933; 21 Oktober 1937.
De Indische Courant 12 Juli 1938.
De Locomotief 29 Februari 1928; 30 Juni 1932.
De Sumatera Post 15 Juni 1938.
Het Vaderland 3 Februari 1939.
Pemberita Makassar 27 Mei 1931; 28 Agustus 1930.
Soerabaijasch Handelsblad 10 Desember 1929; 15 Maret 1932; 19 Agustus 1929; 20 Maret 1931; 21 Desember 1929; 21 Desember 1932; 21 September 1937; 24 Februari 1938; 24 Juli 1931; 25 Maret 1931; 27 Maret 1933; 28 Oktober 1936; 3 April 1929; 7 Mei 1935.
Telefoongids Makassar No. 51 Januari 1940.
Tourism in Netherland India (Macassar and South Celebes Number). (1933). Batavia: Travellers Official Information Bureau.

Buku, Disertasi, Jurnal, Tesis dan Website

- Adams, K. M. (1998). Domestic Tourism and Nation-building in South Sulawesi. *Indonesia and the Malay World*, 26(75), 77-96.
- Ariwibowo, G. A. (2015). Wisata Alam di Keresidenan Priangan pada Periode Akhir Kolonial (1830-1942). *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah dan Budaya*, 7(3), 399-414.
- Asba, A. R. (2003). Ekspansi dan Kontraksi Ekspor Kopra Makassar 1883-1958 (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia).
- Christian, R., & Jayne, R. (2019). Historical Urban Tourism: Developmental Challenges in Johannesburg 1920-1950. *Urbani Izziv Urbani Izziv*, 30, 112-128.
- Cribb, R. (1995). International Tourism in Java, 1900-1930. *South East Asia Research*, 3(2), 193-204.
- Gottschalk, L. (1985). *Mengerti Sejarah* (Nugroho Notosusanto, trans.). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Harvey, Barbara S. (1989). *Pemberontakan Kahar Muzakkar : Dari Tradisi ke DI/TII*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- _____. (1990). Sulawesi Selatan: Boneka dan Patriot. In A. R. Kahin (Ed.), *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemerdekaan* (pp. 212-240). Jakarta: Grafiti.
- Koerts, H. . (2001). Amtenar BB di Sulawesi Selatan. In S. . van der Wal (Ed.), *Kenang-kenangan Pangrehpraja Belanda 1920-1942* (Team Perwakilan KITLV, trans.) (pp. 42-71). Jakarta: Djambatan.
- Makkelo, I. D. (2018). Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar pada Abad ke-20. *Jurnal Sejarah*, 1(2), 46-64. <https://doi.org/10.26639/js.v1i2.79>
- Meulendijks, H. (2017). Tourism and Imperialism in the Dutch East Indies: Guidebooks of the Vereeniging Touristenverkeer in the late colonial era (1908-1939) (Thesis, Utrecht University).
- Nasution, D. D. (16 Oktober 2019). *Arief Yahya: Pariwisata akan Jadi Penyumbang Devisa Terbesar*. sources URL <https://republika.co.id/berita/pzg16u383/arief-yahya-pariwisata-akan-jadi-penyumbang-devisa-terbesar>
- Paeni, M., Poelinggomang, E. L., & Mirawati, I. (2002). *Batara Gowa : Messianisme dalam Gerakan Sosial di Makassar*. Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia kerjasama dengan Gadjah Mada University Press.
- Poelinggomang, E. L. (2004). *Perubahan Politik dan Hubungan Kekuasaan Makassar 1906-1942*. Yogyakarta: Ombak.
- Poelinggomang, E. L., Mappangara, S., Limbugau, S., Amar, S., & Sahajuddin. (2005). *Sejarah Sulawesi Selatan (Jilid 2)*. Makassar: Balitbangda - MSI Sulawesi Selatan.
- Said, E. (2012). *Orientalisme* (Asep Hidayat, trans). Bandung: Pustaka.
- Sunjayadi, A. (2017). *Dari Vreemdelingen ke Toeristenverkeer: Dinamika Pariwisata di Hindia-Belanda 1891-1942* (Doctoral dissertation, Universitas Indonesia).
- _____. (2018). *Dari Turisme ke Pariwisata: Melacak Jejak Istilah Turisme di Indonesia*. *Melancong: Jurnal Perjalanan Wisata, Destinasi, dan Hospitalitas*, 1(1), 1-23.
- Wallace, A. R. (2016). *The Malay Archipelago - Volume 1*. Place of publication not identified: READ Books.
- Wiretno. (2019). *Aktivitas Peleisir Orang-Orang Eropa di Masa Kolonial (Abad-20)*. *Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, Budaya dan Pengajarannya*, 13(1), 12-24.